

UPAYA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ALAS KAKI
DI KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO

SKRIPSI



Oleh :

CAHAYA WULAN AGUSTINA

NPM : 0841010029

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA

2012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “UPAYA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA UKM ALAS KAKI DI KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Pudjo Adi, Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat serta motivasi kepada penulis. Dan penulis juga banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa moril, spiritual maupun materiil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak DR. Lukman Arif, M.Si, Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Susi Hardjati, MAP. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Susi Hardjati, MAP, Ibu Dra. Ertien Rining N, M.Si, dan Bapak drs. Hartono Hidayat, M.Si selaku tim penguji proposal yang telah menyempurnakan dalam penelitian ini.
5. Bapak Djoni Julianto selaku Sekertaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
6. Bapak Emru Suhadak selaku Ketua Pengurusan KOMPAK Kota Mojokerto.
7. Orang tua saya yang memberikan doa dan kasih sayang selalu.
8. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi fakultas pada umumnya serta para pembaca.

Surabaya, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAKSI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Landasan Teori.....	17
2.2.1. Pengertian Pemberdayaan.....	17
2.2.2. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	33
2.2.3. Pengertian Pelatihan	41
2.2.4. Sumber Daya Manusia.....	46
2.2.5. Pemasaran.....	48
2.2.6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	50
2.3. Kerangka Berpikir	57
 BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Jenis Penelitian.....	58
3.2. Fokus Penelitian.....	59

3.3. Lokasi Penelitian.....	61
3.4. Sumber Data.....	62
3.5. Pengumpulan Data.....	64
3.6. Analisis Data.....	66
3.7. Keabsahan Data.....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71
4.1. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.....	71
4.1.1. Sejarah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	71
4.1.2 Visi Misi dan Tujuan	73
4.1.2.1. Visi.....	73
4.1.2.2. Misi.....	73
4.1.2.3. Tujuan.....	73
4.1.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.....	74
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.....	76
4.1.5. Karakteristik Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.....	89
4.1.6. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.....	90
4.1.7. Gambaran Umum KOMPAK.....	91
4.1.7.1. Perkembangan Sentra UKM Alas Kaki.....	93
4.2. Hasil Penelitian.....	96
1. Produksi dan Pengolahan.....	98
2. Pemasaran.....	116
3. Sumber Daya Manusia.....	132
4. Permodalan.....	143
A. Pembahasan.....	152

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	174
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	178

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

CAHAYA WULAN AGUSTINA, UPAYA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ALAS KAKI DI KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu keberadaan UKM alas kaki di Kota Mojokerto yang menjadi produk unggulan Kota Mojokerto dan penyumbang dana PDRB terbesar di Kota Mojokerto maka perlu dilestarikan dan dikembangkan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam memberdayakan pengusaha UKM alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto untuk meningkatkan keberdayaan usaha agar lebih berkembang dan mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam pemberdayaan Pengusaha Alas Kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam upaya memberdayakan pengusaha alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan permodalan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan key person dan informan serta dokumentasi dari arsip Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta menggunakan teknik analisis data model interaktif terhadap obyek penelitian yaitu Upaya Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengusaha Alas Kaki Di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dalam meningkatkan keberdayaan usaha terhadap pengusaha UKM alas kaki, dapat disimpulkan bahwa (1) Produksi dan Pengolahan, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan produksi, pelatihan desain, pelatihan pemasaran dan pelatihan manajemen keuangan dan memberi mesin pemotong sehingga menghasilkan peningkatan keberdayaan bidang ekonomi dan pendidikan (2) Pemasaran, kegiatan yang dilakukan adalah membuat buku profil UKM Kota Mojokerto, mengadakan pameran di dalam kota dan mengikuti pameran di luar kota, memberi bantuan etalase dan menyediakan gerai Klinik KUMKM sehingga menghasilkan peningkatan keberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial bagi pengusaha UKM alas kaki. (3) Sumber daya Manusia, kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan kewirausahaan dan membentuk paguyuban KOMPAK sehingga menghasilkan peningkatan keberdayaan bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang pendidikan bagi pengusaha UKM alas kaki. (4) Permodalan, kegiatan yang dilakukan adalah memberi bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan menjalin kerjasama dengan PT. Telkom untuk memberi bantuan modal dengan bunga ringan sehingga menghasilkan peningkatan keberdayaan bidang soaial dan bidang ekonomi bagi pengusaha UKM alas kaki.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Kota Mojokerto merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dan diselaraskan secara terpadu antara sektor yang satu dengan sektor lain. Pembangunan ekonomi Kota Mojokerto mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2010, diantaranya dengan menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada posisi yang strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, serta sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu hal yang telah dikembangkan oleh pemerintah sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional, didukung oleh dunia usaha untuk meningkatkan kekuatan ekonomi bangsa dan negara yang mengalami krisis ekonomi sampai saat ini. Kini, tantangan ekonomi nasional semakin berat dengan datangnya globalisasi ekonomi yang menuntut kebebasan pasar dalam setiap produk negara maju pada pasar-pasar negara berkembang (developing countries). Kedatangan pasar bebas tidak dapat terhindarkan lagi bagi pengusaha untuk bersaing secara jujur di pasar nasional. Padahal, pasar nasional turut dipenuhi oleh produk lokal dari usaha-usaha kecil yang masih perlu dilindungi dan ditingkatkan kualitasnya pasca amandemen UUD 1945.

Pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan yakni dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM diberdayakan dengan tujuan mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Maka dengan adanya peraturan daerah ini telah jelas bahwa UMKM diatur dalam peraturan pemerintah untuk ditumbuh kembangkan serta diberdayakan agar turut meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan basis kerakyatan atau sumber kehidupan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan

UMKM semakin tinggi dikarenakan banyak karyawan dari perusahaan besar yang menutup usahanya ketika badai krisis terjadi, mulai mengambil langkah untuk berwirausaha serta terjadi transformasi status dari pegawai menjadi wirausahawan UMKM. Hal ini membuktikan bahwa UMKM memiliki kemampuan bertahan dengan usahanya ditengah krisis ekonomi yang terjadi dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. Dengan kata lain, peran keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Menurut Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Subagio Dwijosumono, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional telah melebihi separuh dari PDRB. Data BPS menunjukkan pada 2009, komposisi PDRB nasional tersusun dari UKM sebesar 53,32%, kemudian usaha besar 41,00%, dan sektor pemerintah 5,68%. Sebagai perbandingan, survei oleh Citibank mendapatkan angka kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB 2009 mencapai 55,56%. Riset Citibank selama periode 2005-2009 juga menunjukkan jumlah unit UMKM mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 8,16% per tahun. Estimasi pertumbuhan pelaku usaha tersebut mencerminkan bahwa setiap pertumbuhan 1% PDRB akan menciptakan 42.797 pelaku usaha baru di Indonesia.

(http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=487:bps-tambah-surveiukm-mulai-2011&catid=50:bind-berita&Itemid=97).

Melihat peran sektor usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi sektor terbesar dalam PDRB Kota Mojokerto, maka kontribusi UKM yang merupakan usaha industri kecil sangat besar untuk peningkatan perekonomian Kota Mojokerto sendiri. Beragam jenis produk UKM yang dimiliki oleh Kota Mojokerto, begitu pula dengan pelaku usahanya yang terbesar di beberapa wilayah. Berikut daftar UKM yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Mojokerto :

Tabel. 1
Daftar UMKM Kota Mojokerto 2011

WILAYAH		JENIS USAHA	UNIT USAHA
Kecamatan Magersari	Kel. Gedongan	Bordir	2
	Kel. Balongsari	Jok Mobil	4
	Kel. Kedundung	Kompor	5
	Kel. Gunung Gedangan	Batik	6
	Kel. Wates	- Meubel	3
		- Alas Kaki	7
	Ke. Sentanan	Kue	3
Kecamatan Prajurit Kulon	Kel. Mentikan	- Konveksi	4
		- Alas Kaki	3
	Kel. Blooto	- Tape	31
		- Alas Kaki	4
	Kel. Prajurit Kulon	- Miniatur Kapal	4
		- Alas Kaki	4
	Kel. Kranggan	- Tempe	15
		- Alas Kaki	1
	Kel. Pulorejo	- Cor Kuningan	29
		- Konveksi	2
		- Tempe	15
		- Alas Kaki	1
	Kel. Miji	Alas Kaki	44
	Kel. Surodinawan	- Sablon	5
		- Batik Tulis	10
		- Alas Kaki	5
Jumlah UKM Alas Kaki Kecamatan Prajurit Kulon			62

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2011.

Berdasar data pada tabel di atas, dengan melihat berbagai jenis usaha di dua kecamatan yaitu, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon di Kota Mojokerto, jenis usaha yang paling dominan adalah usaha alas kaki yakni sebanyak 69 pengusaha alas kaki yang berada di delapan kelurahan yaitu Kelurahan Wates, Mentikan, Blooto, Prajurit Kulon, Kranggan, Pulorejo, Miji, dan Surodinawan. Namun di Kecamatan Magersari hanya terdapat satu kelurahan yang terdapat usaha alas kaki yaitu Kelurahan Wates dengan sebanyak 7 pengusaha alas kaki. Dan ada satu kecamatan yang paling dominan dengan usaha alas kaki adalah di Kecamatan Prajurit Kulon. Dari ketujuh kelurahan di Kecamatan Prajurit Kulon tercatat bahwa setiap kelurahan mempunyai usaha alas kaki yakni sebesar 62 pengusaha alas kaki yang terdapat di Kecamatan Prajurit Kulon.

Dengan melihat keberadaan UMKM di Kota Mojokerto terutama pada pengusaha alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ini dalam kancah perekonomian nasional peranannya cukup dominan dan strategis, mengingat dari pengusaha alas kaki ini telah banyak menyerap tenaga kerja dan telah memberikan andil bagi Kota Mojokerto terhadap pertumbuhan ekonominya. Namun demikian bukan berarti bahwa pengusaha alas kaki sudah tidak perlu lagi mendapatkan perhatian, mengingat UMKM alas kaki adalah UMKM yang paling dominan di Kota Mojokerto sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian lokal dengan berhasil menambah PDRB Kota Mojokerto dan juga mampu menyerap tenaga kerja serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya, oleh karena itu maka langkah yang tepat adalah dengan melakukan pemberdayaan pada pengusaha

alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dengan melakukan intervensi yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan sosial, individu maupun kelompok.

Sedemikian pentingnya arti UMKM dalam pembangunan ekonomi di Kota Mojokerto, seperti apa yang telah tertuliskan diatas sehingga UMKM sangat perlu untuk diberdayakan oleh pemerintah. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pada pemerintah daerah diharapkan dapat memberdayakan UKMM. Seperti pada Pemerintah Kota Mojokerto salah satunya yakni oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan demi untuk pemberdayaan UMKM khususnya pada UMKM alas kaki yang tergabung dalam KOMPAK (Komite Pengusaha Alas Kaki) pada daerah yang terdiri atas tujuh kelurahan di Kecamatan Prajurit Kulon ini berupaya mengoptimalkan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada pengusaha alas kaki.

Dalam pemberdayaan pengusaha alas kaki yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun, disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil yang terjadi pada pengusaha alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ini menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Secara lebih spesifik, masalah yang dihadapi pengusaha kecil adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan dibidang

organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Menurut Siahaan, Rambe dan Mahidin (2006: 11), pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan pihak yang diberdayakan yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat, memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) pihak yang diberdayakan dengan pengalaman merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi (Kartasmita, 1996 : 249).

Konsep pemberdayaan yang dilakukan adalah bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya, (Rukminto, 2008:78). Pemberdayaan yang didasari dengan model pengembangan masyarakat lokal dan melihat sumber daya manusianya yang dilakukan dengan perubahan masyarakat dan pihak lain (diluar sistem sosialnya) untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, dan meningkatkan integritas masyarakat ke dalam suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, serta mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. (Rothman, 1995:27:34).

Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009, pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Bantuan modal;
- b. Pembinaan manajemen;
- c. Bimbingan teknis;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Pemasaran produk;
- f. Pendaftaran usaha;

- g. Sertifikasi penduduk;
- h. Ekspor-impor;
- i. Perpajakan; dan
- j. Fasilitasi dan pembinaan di bidang hak atas kekayaan intelektual.

Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Kota juga memfasilitasi dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi.

Berbicara mengenai upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dijelaskan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 188.4/46/417.305/2011 yang terkait dengan program pemberdayaan UMKM yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan adanya model sinergitas/koordinasi antar lembaga maupun instansi pembina UMKM agar pemberdayaan lebih terarah, berkesinambungan dan terukur. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada salah satu instansi terkait yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yang terkait dalam upaya Pemerintah Kota dalam memberdayakan pengusaha UKM alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah agar terciptanya suatu keberdayaan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UKM alas kaki.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pemberdayaan UMKM pada pengusaha alas kaki yang tergabung dalam KOMPAK di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tentunya sangat

berpengaruh pada tingkat PDRB Kota Mojokerto dan penyerapan tenaga kerja, serta pendapatan masyarakatnya. Mengingat usaha pembuatan alas kaki ini adalah UMKM yang paling dominan di Kota Mojokerto, dengan demikian diharapkan pemberdayaan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya, serta dapat meningkatkan PDRB Kota Mojokerto. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul “Upaya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengusaha Alas Kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam pemberdayaan pengusaha alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam upaya memberdayakan pengusaha alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal apa yang akan dituju dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, dan menguji suatu gejala. Berdasarkan uraian diatas dan berlandaskan pada rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam pemberdayaan pengusaha alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto?
2. Mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam upaya memberdayakan pengusaha alas kaki di Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan tanggung jawab sosial secara efektif bagi instansi-instansi di Indonesia.

b. Bagi Universitas

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

c. Bagi Peneliti

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan berfikir serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh untuk dilaksanakan di lapangan.